

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI**

Zachari Abdallah

Email : ariey_cosmoride@yahoo.com

Maryanto

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SAKTI ALAM KERINCI

Abstrak : *Influence of interest aparatur local government and adherence [at] regulation perundanagn to akuntabilitas governmental institution performance sub-province kerinci. Research this in do [at] 43 SKPD government of sub-province kerinci. Research this use Descriptive method with approach survey. Data collecting of primary in do with give kuesioner to responder head Set of Kerja,bagian keuangan,dan part of perencanaan/program. Result of research show that: first, in parsial and in simultan interest aparatur area and adherence [at] regulation perundangan influential to akuntabilitas performance of institution local government. Both, big its influence of interest aparatur area 31,7% and adherence [at] regulation perundangan to akuntabilitas governmental institution performance equal to 38,1% Third, from both variable the which most dominant influence akuntabilitas governmental institution performance is variable adherence [at] regulation perundangan the big its influence equal to 38,1%.*

Kata Kunci : *interest Aparatur local government, applying Akuntabilitas Monetary, adherence [at] regulation perundangan,akuntabilitas governmental institution performance*

PENDAHULUAN

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. Disamping itu pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja suatu instansi. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah maka akan berpengaruh pada penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara baik dan memadai. Penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan

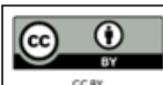
memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten kerinci, dan variable yang paling dominan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kerinci.

TELAAH LITERATUR

Kompetensi Aparatur

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi jabatan aparatur daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur Negara pemerintah.



Ketaatan pada peraturan perundangan

Akuntansi dan kaitainya dengan hukum ini telah dikemukakan oleh Choi dalam Soleman (2007) dalam pandangainya mengenai akuntansi dengan lingkungannya. Menurutnya terdapat delapan elemen lingkungan yang mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya. Choi juga menambahkan bahwa ada pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi. Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan suatu paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik Indonesia, diantaranya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pertunbangan dalam membuat kebijakan dan program, mengukur hasilnya atau hasil dibandingkan dengan standarnya. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakan kerangka kerja untuk mengukur hasil dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pemimpin-pemimpin politik, pengambil keputusan dan manajer program. Sistem ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer program, dan juga berguna bagi penyedia program, konsumen, dan publik. Akuntabilitas terfokus pada hasil dari suatu kegiatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan pada penelitian ini terdiri dari : Data Primer yaitu data yang di peroleh dari objek penelitian melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder yaitu data yang di kumpulkan melalui struktur-struktur organisasi, data-data pegawai atau yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di

lakukan, dan buku-buku erat kaitannya dengan penelitian.

Sumber Data

Semua SKPD yang ada di lingkup pemerintah kabupaten kerinci, dan literatur lainnya yang relevan.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah di kabupaten kerinci yang berjumlah 43 SKPD. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja, bagian keuangan, dan bagian perencanaan/program, per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup kabupaten kerinci yaitu berjumlah 129 orang (3 orang per SKPD . salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang di atas 100 adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut :

dimana

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$129/1 + 129(0.1)^2$$

$$129/2,29 = 56,33 = 56 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode dan Alat Analisis

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif.

Alat Analisis yang di gunakan yaitu ;

Regresi Linear Berganda berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas kinerja instansi

X₁ = Kompetensi aparatur daerah

X₂ = ketaatan pada peraturan perundangan

b₀ = Intercept

b₁, b₂ = Koefisien Regresi Dari Variabel Bebas

- Koefisien Determinasi (KD) berguna untuk melihat besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel terikat Y digunakan Koefisien Determinasi dengan rumus : $KD = r^2 \times 100\%$

$$\text{Dimana : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

KD = Koefisien Determinasi

R = Nilai koefisien Korelasi

HASIL DAN DISKUSI

Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.641	2.854		6.881	.000
	X1	.067	.027	.301	2.429	.019
	X2	.109	.036	.372	3.004	.004

Model	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.917	25.366					
X1	.012	.122	.253	.317	.298	.984	1.017
X2	.036	.182	.334	.381	.369	.984	1.017

a. Dependent Variable: Y

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 1 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 19,641 + 0,067X_1 + 0,109X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 19,641, Hal ini berarti bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan maka nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 19,641

b. Koefisien Regresi dari variable bebas Kompetensi Aparatur Daerah (X₁) bertanda positif sebesar 0,067 ini berarti bahwa dengan meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,067 satuan.

c. Koefisien regresi (β) dari variable Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X₂) sebesar 0,109 satuan ini berarti bahwa dengan meningkatnya Ketaatan pada Peraturan Perundangan satu satuan, maka akan

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,169 satuan.

- Uji Signifikansi Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Kompetensi Aparatur Daerah (X1) yang di tandai dengan nilai t –hitung sebesar 2,429 > t table sebesar 2, 004 atau nilai signifikansinya 0,019 < 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Ketaatan pada peraturan perundangan (X2) yang di tandai dengan nilai t –hitung sebesar 3.004 > t table sebesar 2, 004 atau nilai signifikansiya 0,004 < 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2. ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.739	2	13.369	6.641	.003 [*]
	Residual	106.690	53	2.013		
	Total	133.429	55			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

3. Dari hasil pengujian tersebut secara keseluruhan dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 2 diatas bahwa nilai signifikansi 0.003 < 0,05, atau F hitung > F table yaitu 6,641 > 3,171, hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti

terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Besarnya Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Besarnya pengaruh kompetensi aparatur daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 31,7% sedangkan sisanya 68,3% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Besarnya pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 38,1% sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Besarnya Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada table 3 berikut :

Tabel 3 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 ^a	.200	.170	1.419	1.699

Model Summary^b

Model	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2		
1	.200	6.641	2	53	.003	1.699

Pada tabel 3 diatas angka R Square adalah 0,200 yaitu hasil kuadrat dari koefisien

korelasi 0,448 . Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 20% sedangkan sisanya 80% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini.

4. Dari kedua variable tersebut yang paling dominan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah variable ketaatan pada peraturan perundangan dengan besarnya pengaruh sebesar 38,1%.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengolahan data pada bab V, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditandai dengan T hitung lebih besar dari T table ($2,429 > 2,004$ dan $3,004 > 2,004$) dan secara simultan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Aparatur Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditandai dengan F hitung lebih besar dan F Tabel ($6,641 > 3,171$)
2. Besarnya pengaruh kompetensi aparatur daerah sebesar 31,7% dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 38,1%. Dan secara simultan besarnya pengaruh sebesar 20% sedangkan sisanya 80% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini.

3. Dari kedua variable tersebut yang paling dominan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah variable ketaatan pada peraturan perundangan dengan besarnya pengaruh sebesar 38,1%.

Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis menyarankan :

1. Diharapkan kepada bagian keuangan dan bagian perencanaan/program, per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci agar dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun workshop yang berkaitan dengan tata kelola keuangan .
2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LAKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga terdapat perbaikan setiap periodenya.
3. Karena sering adanya keterlambatan penyampaian laporan, sebaiknya diberlakukan sanksi dan reward untuk mendukung pelaksanaan Sistem AKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Pengaruh kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Arua, Nakkok. 2003. *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Deskriptif di Jawa Timur*. Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur.
- Esya, Febri Purnama. 2008. *Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja*

*Auditor Bea dan Cukai di Wilayah
Jakarta.* Universitas Sumatera Utara. Medan
<http://id.journal.uui.ac.id>(diakses
23 Maret 2012).

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen
Keuangan Daerah.* Andi. Yogyakarta